

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. Landasan Teori

1. Teori Perkembangan Moral Kohlberg

Tahapan perkembangan moral adalah ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang berdasar perkembangan penalaran moralnya seperti yang diungkapkan Kohlberg (1969). Teori ini berpandangan bahwa penalaran moral yang merupakan dasar dari perilaku etis, mempunyai enam perkembangan yang dapat teridentifikasi. Ia mengikuti perkembangan dari keputusan moral seiring dengan penambahan usia yang semula diteliti oleh Piaget (1958), yang menyatakan bahwa logika dan moralitas berkembang melalui tahapan-tahapan konstruktif. Kohlberg (1969) memperluas pandangan dasar ini dengan menentukan bahwa proses perkembangan moral pada prinsipnya berhubungan dengan keadilan dan perkembangannya berlanjut selama kehidupan.

Kohlberg (1969) menggunakan cerita-cerita tentang dilema moral dalam penelitiannya dan ia tertarik pada bagaimana orang-orang akan menjustifikasi tindakan-tindakan mereka bila mereka berada dalam persoalan moral yang sama. Kohlberg (1969) kemudian mengkategorisasi dan mengklasifikasi respon yang dimunculkan ke dalam enam tahap yang berbeda. Keenam tahapan tersebut dibagi ke dalam tiga tingkatan sebagai berikut:

1. Tahap Pra-Konvensional

Tingkat pra-konvensional dari penalaran moral umumnya terdapat pada anak-anak, walaupun orang dewasa juga dapat menunjukkan penalaran



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dalam tahap ini. Individu yang berada dalam tingkat pra-konvensional menilai moralitas dari suatu tindakan berdasarkan konsekuensinya secara langsung. Tingkat pra-konvensional terdiri dari dua tahapan awal dalam perkembangan moral, dan murni melihat sudut pandangan diri dalam bentuk egosentris. Kedua tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Tahapan pertama, individu-individu memfokuskan diri pada konsekuensi langsung dari tindakan mereka yang dirasakan sendiri. Misalkan, suatu tindakan dianggap salah secara moral bila orang yang melakukannya dihukum. Semakin keras hukuman yang diberikan, semakin salah tindakan tersebut. Hal ini mengartikan bahwa setiap individu memiliki sudut pandang yang berbeda satu sama lainnya. Tahapan ini bisa dinyatakan sebagai otoriterisme.
- (2) Tahapan kedua, menyatakan bahwa perilaku apa yang menguntungkan bagi dirinya sendiri atau bisa dikatakan apa yang paling diminati oleh individu. Penalaran tahap kedua kurang menunjukkan perhatian pada kebutuhan orang lain, hanya sampai tahap bila kebutuhan tersebut juga memiliki pengaruh bagi dirinya sendiri. Dalam tahap ini, perhatian kepada orang lain tidak didasari oleh loyalitas atau faktor yang bersifat intrinsik. Kekurangan perspektif tentang masyarakat dalam tingkat pra-konvensional, berbeda dengan kontrak sosial (tahap kelima), sebab semua tindakan dilakukan untuk melayani kebutuhan diri sendiri saja. Pada tahap kedua ini, perspektif dunia dilihat sebagai sesuatu yang bersifat relatif secara moral.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Tahap Konvensional

Tingkat konvensional umumnya terletak pada seorang remaja atau orang dewasa. Dalam tahapan ini, individu menilai moralitas dari suatu tindakan dengan membandingkannya dengan pandangan dan harapan masyarakat. Tingkat konvensional terdiri dari tahap ketiga dan keempat dalam perkembangan moral sebagai berikut:

- (1) Tahapan ketiga, seorang individu memasuki kehidupan bermasyarakat dan memiliki peran sosial. Individu mau menerima persetujuan atau ketidaksetujuan dari orang lain karena hal tersebut merefleksikan persetujuan masyarakat terhadap peran yang dimilikinya. Individu mencoba untuk memerankan menjadi seorang individu baik untuk memenuhi harapannya karena telah mengetahui terdapat manfaat melakukan hal tersebut. Penalaran tahap ketiga menilai moralitas dari suatu tindakan dengan mengevaluasi konsekuensinya dalam bentuk hubungan interpersonal, yang mulai menyertakan hal seperti rasa hormat, rasa terima kasih, dan *golden rule*. Keinginan untuk mematuhi aturan dan otoritas dilakukan hanya untuk membantu peran sosial yang stereotip.
- (2) Tahapan keempat, merupakan suatu hal penting untuk mematuhi hukum, keputusan, dan konvensi sosial karena berguna dalam memelihara fungsi dari masyarakat. Penalaran moral dalam tahap keempat lebih dari sekedar kebutuhan akan penerimaan individual seperti tahap ketiga dimana kebutuhan masyarakat harus melebihi kebutuhan pribadi. Idealisme sering diutamakan untuk menentukan apa yang benar dan apa yang salah. Apabila seseorang melanggar hukum,

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



maka ada kemungkinan bahwa orang lain akan melakukan hal tersebut pula, sehingga ada kewajiban atau tugas untuk mematuhi hukum dan aturan. Apabila seseorang melanggar hukum, maka individu tersebut salah secara moral, sehingga celaan menjadi faktor yang signifikan dalam tahap ini karena memisahkan yang buruk dari yang baik.

3. Tahap pasca-konvensional

Tahap pasca-konvensional dikenal sebagai tingkatan berprinsip yang terdiri dari tahap kelima dan keenam dari perkembangan moral. Kenyataan bahwa individu-individu adalah entitas yang terpisah dari masyarakat kini menjadi semakin terlihat jelas. Perspektif seseorang harus dilihat sebelum perpektif masyarakat, akibatnya hakekat diri mendahului orang lain. Hal ini yang membuat tingkatan pasca-konvensional sering tertukar dengan perilaku pra-konvensional. Tahap kelima dan keenam dalam tahapan pasca-konvensional sebagai berikut:

(1) Tahapan kelima, setiap individu dipandang sebagai masyarakat yang memiliki pendapat dan nilai yang berbeda, dan merupakan hal yang penting bahwa mereka dihormati dan dihargai tanpa memihak. Permasalahan yang tidak dianggap sebagai relatif seperti kehidupan dan pilihan jangan sampai ditahan atau dihambat. Pada kenyataannya, tidak terdapat pilihan pasti benar atau absolut. Berkaitan dengan hal tersebut, hukum dilihat sebagai kontrak sosial dan bukannya keputusan kaku. Aturan-aturan yang tidak mengakibatkan kesejahteraan sosial harus diubah bila dibutuhkan demi terpenuhinya kebaikan terbanyak untuk sebanyak-banyaknya orang. Hal tersebut diperoleh melalui keputusan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mayoritas dan kompromi. Dalam tahap ini, pemerintahan yang demokratis tampak berlandaskan pada penalaran tahap kelima.

- (2) Tahapan keenam, penalaran moral berdasarkan pada penalaran abstrak menggunakan prinsip etika universal. Hukum hanya berlaku atau valid apabila berdasarkan pada keadilan dan komitmen terhadap keadilan juga menyertakan keharusan untuk tidak mematuhi hukum yang tidak adil. Keputusan dihasilkan secara kategoris dalam cara yang absolut dan bukannya secara hipotetis secara kondisional. Hal ini diterapkan dengan membayangkan apa yang akan dilakukan seseorang saat menjadi orang lain, yang juga memikirkan apa yang dilakukan apabila memiliki pemikiran sama. Tindakan yang diambil merupakan hasil konsensus. Dengan cara seperti ini, tindakan tidak pernah menjadi cara, tetapi selalu menjadi hasil dengan pengertian dimana seorang bertindak bukan karena hal itu benar dan bukan karena maksud pribadi, sesuai harapan, legal, atau sudah disetujui sebelumnya. Walau Kohlberg meyakini bahwa tahapan ini ada, ia merasa kesulitan menemukan individu yang menggunakannya secara konsisten.

4. Definisi Kecurangan Akuntansi

Definisi Kecurangan

Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, 2010) yang dikutip dalam Jurnal Internasional, mendefinisikan kecurangan sebagai berikut:

“A deception or misrepresentation that an individual or entity makes knowing that misrepresentation could result in some unauthorized benefit to the individual or to the entity or some other party.”

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pengertian kecurangan menurut Arens (2011: 372) adalah sebagai salah saji laporan keuangan yang disengaja. Pelaporan keuangan yang curang adalah salah saji atau pengabaian jumlah atau pengungkapan yang disengaja dengan maksud menipu para pemakai laporan keuangan tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kecurangan adalah penyajian fakta yang bersifat material secara salah yang dilakukan oleh satu pihak ke pihak lain dengan tujuan untuk menipu dan memperoleh sesuatu yang bukan hak pelaku.

5. Definisi Kecurangan Akuntansi

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI, 2011: 316.2) dalam Pernyataan Standar Auditing No 70, menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai:

- (1) Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji / penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan,
- (2) Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva sering disebut penyalahgunaan atau penggelapan berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



6. Unsur-Unsur Kecurangan

Suatu tindakan dapat disebut kecurangan apabila salah satu dari unsur dibawah ini terpenuhi, antara lain:

- a. Harus terdapat penyajian yang keliru,
- b. Dari suatu masa lampau / sekarang,
- c. Faktanya material,
- d. Dilakukan dengan sengaja / tanpa perhitungan,
- e. Dengan maksud untuk menyebabkan suatu pihak beraksi,
- f. Pihak yang dirugikan harus bereaksi terhadap kekeliruan penyajian,
- g. Mengakibatkan kerugian.

7. Kondisi-Kondisi Penyebab Kecurangan

Dalam Arens (2011: 375) terdapat tiga kondisi yang menyebabkan terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset sebagaimana dijelaskan dalam PSA 70 (SA 316) terdapat tiga kondisi yang menyebabkan kecurangan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori umum dan dikenal sebagai “segitiga kecurangan (*fraud triangle*)”, antara lain:

- a. Tekanan situasional (*situational pressure*)

Tindakan *fraud* dilakukan oleh seorang individu diakibatkan adanya tekanan dari dirinya untuk melakukan *fraud* dimana dianggap oleh sang pelaku merupakan suatu jalan keluar atas masalah keuangan yang dialaminya.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Peluang (*opportunity*)

Adanya suatu keadaan yang timbul di dalam lingkungan pekerjaan di mana staf atau pihak manajemen dapat melakukan *fraud*.

c. Sikap / Rasionalisasi (*Attitude / Rationalization*)

Suatu sikap moral dan etika di mana seseorang mengetahui secara tepat bahwa tindakan *fraud* yang telah atau akan dilakukannya merupakan suatu tindakan yang salah, tetapi pihak yang bersangkutan tetap menganggap bahwa tindakannya adalah benar.

8. Jenis-Jenis Kecurangan dalam Lingkungan Akuntansi

Dalam suatu organisasi usaha, kecurangan dapat dilakukan terhadap suatu perusahaan, dan dikenal sebagai *corporate fraud*. Kecurangan juga melibatkan penggunaan suatu sistem akuntansi untuk menggambarkan suatu citra palsu suatu perusahaan, yang disebut kecurangan pelaporan keuangan. Kecurangan dapat dilakukan oleh manajemen atau seseorang dalam posisi yang dipercaya, yang disebut kecurangan manajemen (*management fraud*).

Kecurangan dapat terjadi karena kegagalan auditor untuk mendeteksi kesalahan penyajian yang disebut kegagalan audit. Kegagalan audit merupakan tindakan kecurangan yang membawa dampak sangat berat.

Jenis-jenis kecurangan dalam lingkungan akuntansi antara lain:

a. Kecurangan korporasi (*Corporate Fraud*)

Kecurangan korporasi biasanya dilakukan oleh manajer pusat laba dan perusahaan publik untuk memuaskan kebutuhan ekonomis jangka pendek mereka.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- b. Kecurangan pelaporan keuangan
Kecurangan ini merusak integritas informasi keuangan dan dapat memengaruhi berbagai korban seperti pemilik kreditur, karyawan, auditor, dan bahkan kompetitor.
- c. Kecurangan manajemen
Kecurangan yang dilakukan karena jabatan dimotivisir oleh norma-norma sosial, diterima dan dilakukan oleh kelompok secara tidak langsung memberikan dukungan pada aktivitas tidak legal. Kecurangan yang terjadi oleh karena organisasi dimungkinkan karena tanggapan yang ada atas permintaan ekonomis. Kecurangan manajemen dapat mengakibatkan kerugian ekonomis, kerugian fisik dan merusak struktur sosial. Kecurangan manajemen bercirikan lima komponen utama:
 1. Bermaksud melakukan kejahatan,
 2. Menyamakan tujuan,
 3. Mempercayai kenafian korban,
 4. Tindakan korban yang sukarela terhadap pelanggaran,
 5. Menyembunyikan pelanggaran.
- d. Kegagalan audit
Auditor diharapkan dapat mendeteksi dan mengoreksi atau mengungkapkan setiap kelalaian atau kesalahan besar dalam penyajian informasi keuangan. Apabila auditor gagal untuk memenuhi ekspektasi ini, suatu kegagalan audit merupakan hasil yang tidak dapat dielakkan. Kegagalan auditor dalam mendeteksi kesalahan dapat menimbulkan kerugian bagi klien. Hal ini dapat menyebabkan situasi litigasi dan pembayaran potensial kepada penggugat / penuntut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



9. Pohon Fraud (*Fraud Tree*)

Menurut Tuanakotta (2007), *occupational fraud tree* mempunyai tiga cabang utama yakni *corruption*, *asset misappropriation*, dan *fraudulent statement*.

a. *Corruption* (Korupsi)

Istilah *corruption* digambarkan dalam empat bentuk yaitu *conflict of interest*, *bribery*, *illegal gratuities*, dan *economic exortion*.

1) *Conflict of interest*

Terjadi ketika seorang karyawan bertindak atas nama pihak ketiga dalam melakukan pekerjaannya atau memiliki kepentingan pribadi dalam pekerjaan yang dilakukannya.

2) *Bribery*

Melibatkan pemberian, penawaran, permohonan untuk menerima atau penerimaan berbagai hal yang bernilai untuk memengaruhi seorang pejabat dalam melakukan kewajiban sahnya.

3) *Illegal gratuities*

Melibatkan pemberian, penerimaan, penawaran, atau permohonan untuk menerima sesuatu yang bernilai karena telah melakukan tindakan yang resmi.

4) *Economic exortion*

Penggunaan tekanan terhadap seseorang atau perusahaan untuk mendapatkan sesuatu yang berharga (asset keuangan atau ekonomi, informasi, atau kerjasama untuk mendapatkan keputusan dalam penyelesaian masalah).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. *Asset Misappropriation*

Istilah *asset misappropriation* terdiri dari empat bentuk yaitu pembebanan ke akun beban, *lapping*, kecurangan transaksi dan kecurangan dengan komputer.

1) Pembebanan ke akun beban

Pencurian aset dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam persamaan dasar akuntansi yang harus disesuaikan oleh si pelaku kejahatan jika ingin pencurian tersebut tetap tidak terdeteksi. Cara yang paling umum adalah dengan membebankan aset ke akun dan mengurangi ekuitas dalam jumlah yang sama. Jika akun beban ditutup ke saldo laba, maka saldonya akan nol kembali pada awal periode baru.

2) *Lapping* (gali lubang tutup lubang)

Teknik gali lubang tutup lubang melibatkan penggunaan cek dari para pelanggan, menerima pembayaran rekening mereka, untuk menutupi kas yang sebelumnya dicuri oleh seorang karyawan. Hal ini dapat dicegah dengan melakukan rotasi karyawan secara berkala dan memaksa untuk mengambil libur terjadwal.

3) Kecurangan transaksi

Kecurangan transaksi melibatkan penghapusan, perubahan, atau penambahan transaksi palsu untuk mengarahkan aset ke pelaku kecurangan.

Teknik ini dapat digunakan dengan mengirim persediaan ke pelaku kecurangan sebagai akibat adanya transaksi penjualan palsu atau pengeluaran kas untuk membayar kewajiban palsu. Salah satu



kecurangan transaksi yang umum dilakukan melibatkan distribusi cek gaji yang tidak benar terhadap karyawan yang tidak ada.

4) Kecurangan dengan komputer

Tindakan kecurangan dengan komputer dapat dilakukan dengan:

- a. Pencurian, kesalahan, atau penyalahgunaan aset dengan cara mengubah berbagai *record* dan *file* yang dapat dibaca komputer.
- b. Pencurian, kesalahan, atau penyalahgunaan aset dengan cara mengubah logika peranti lunak komputer.
- c. Pencurian atau penggunaan secara tidak sah informasi yang dapat dibaca komputer.
- d. Pencurian, kesalahan, atau penyalahgunaan peranti keras komputer.

c. *Fraudulent statement*

Jenis *fraudulent statement* sangat dikenal para auditor yang melakukan *general audit*. Kecurangan dalam menyusun laporan keuangan berupa salah saji (*misstatement* baik *overstatement* atau *understatement*). Dalam *fraud* ini, pelaku dapat menyajikan aset atau pendapatan lebih tinggi dari yang sebenarnya maupun menyajikan aset atau pendapatan lebih rendah dari yang sebenarnya. Menurut Tuanakota (2007: 175), *fraudulent financial reporting* diartikan sebagai kesengajaan atau kecerobohan dalam melakukan sesuatu/tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, yang menyebabkan laporan keuangan menjadi menyesatkan secara material. Menurut

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



akuntansi forensik dan audit investigatif (2007: 175) penyebab terjadinya *fraudulent financial reporting* antara lain:

1. Keserakahan, misalnya dalam kasus Enron. Keserakahan ini dimungkinkan dari harga saham yang mencerminkan laba per saham secara konsisten lebih tinggi dari perkiraan para analisis.
2. Adanya tekanan yang dirasakan oleh manajemen untuk menunjukkan prestasi, misalnya ketika perusahaan mengalami penyusutan pangsa pasar, atau terlanjur mengobral janji di awal tahun, misalnya sasaran EPS.

10. Sistem Pengendalian Internal

Menurut PP No. 8 Tahun 2006 pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan.

Dalam bukunya *Auditing & Assurance Services*, Alvin A. Arens, Randal J. Elder, dkk. (2011: 353) mendefinisikan Pengendalian Internal dengan:

" Proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait dengan pencapaian tujuan manajemen dalam kategori berikut yaitu keandalan dalam laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan."

Dengan menerapkan sistem pengendalian internal yang kuat di dalam organisasi perusahaan dapat mengurangi tingkat kecederungan kecurangan akuntansi. Apabila tingkat sistem pengendalian internalnya



buruk akan mengakibatkan peningkatan kecenderungan kecurangan akuntansi.

Menurut Mulyadi, 2002 dalam jurnal Vani Adelin, 2013, terdapat tiga tujuan pengendalian internal sebagai berikut:

1. Keandalan informasi keuangan, manager bertanggung jawab atas menyiapkan laporan keuangan untuk investor, kreditur, dan para pemakai lainnya. Manajemen mempunyai tanggung jawab baik hukum dan professional untuk meyakinkan bahwa informasi tersebut disiapkan secara wajar.

2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
Kendali dalam suatu organisasi dimaksudkan untuk mendorong penggunaan yang efektif dan efisien atas sumber dayanya, mencakup personel untuk mengoptimalkan sasaran manajemen.

3. Efektivitas dan efisiensi operasi
Perusahaan harus mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasi perusahaan, dimana kegiatan operasi perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Pengendalian internal meliputi lima kategori yang dirancang dan diimplementasikan oleh manajemen untuk memberikan jaminan bahwa sasaran hasil pengendalian manajemen akan terpenuhi, komponen pengendalian internal menurut Arens (2011: 322-333) yaitu

1. Lingkungan pengendalian terdiri dari tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap dari manajemen puncak, para direktur, dan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pemilik dari suatu entitas mengenai pengendalian internal dan pentingnya komponen bagi entitas tersebut.

2. Penilaian resiko adalah identifikasi manajemen dan analisis resiko yang relevan dengan persiapan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip berlaku umum.
3. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen dilaksanakan.
4. Informasi dan komunikasi, sistem informasi yang relevan dengan tujuan laporan keuangan yang meliputi sistem akuntansi.
5. Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja struktur pengendalian intern sepanjang waktu.

11. Sistem Kesesuaian Kompensasi

Menurut pandangan Berger (2008: 643) mendefinisikan kompensasi berdasarkan klasifikasinya yang terdiri dari kompensasi tunai (*cash compensation*), bonus tunai, dan insentif jangka pendek. Kompensasi kotor adalah imbalan yang berbentuk biaya penggajian atas semua keuntungan pegawai dan tunjangan baik total maupun kompensasi tunai. Sementara kompensasi bersih adalah imbalan yang digunakan dengan membandingkan imbalan yang dihitung setelah pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tujuan manajemen kompensasi efektif meliputi sebagai berikut:

1. Memperoleh SDM yang berkualitas.
Kompensasi yang tinggi sangat dibutuhkan untuk memberi daya tarik kepada para pelamar sehingga mendapatkan karyawan yang diharapkan.
2. Mempertahankan karyawan yang ada.
Para karyawan dapat keluar jika besaran kompensasi tidak kompetitif dan akibatnya akan menimbulkan perputaran karyawan yang semakin tinggi.
3. Menjamin keadilan.
Manajemen kompensasi selalu berupaya agar keadilan internal dan eksternal dapat terwujud. Keadilan internal mensyaratkan bahwa pembayaran dikaitkan dengan relatif sebuah pekerjaan sehingga pekerjaan yang sama dibayar dengan besaran yang sama. Keadilan eksternal berarti pembayaran terhadap pekerja merupakan yang dapat dibandingkan dengan perusahaan lain di pasar kerja.
4. Penghargaan terhadap perilaku yang diinginkan.
Pembayaran hendak memperkuat perilaku yang diinginkan dan bertindak sebagai insentif untuk perbaikan perilaku di masa depan. Rencana kompensasi efektif, menghargai kinerja, ketaatan, pengalaman, tanggung jawab dan perilaku-perilaku lainnya.
5. Mengendalikan biaya.
Sistem kompensasi yang rasional membantu perusahaan memperoleh dan mempertahankan para karyawan dengan biaya yang beralasan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

6. Mengikuti aturan hukum.
Sistem gaji dan upah yang sehat mempertimbangkan faktor-faktor legal yang dikeluarkan pemerintah dan menjamin pemenuhan kebutuhan karyawan.
7. Memfasilitasi pengertian.
Sistem manajemen kompensasi hendaknya dengan mudah dipahami oleh spesialisasi SDM, manager dan para karyawan.
8. Meningkatkan efisiensi administrasi.
Program pengupahan dan penggajian hendaknya dirancang untuk dapat dikelola dengan efisien, membuat sistem informasi SDM optimal, meskipun tujuan ini hendaknya sebagai pertimbangan sekunder dibandingkan dengan tujuan-tujuan lain.
Menurut Mathis dan Jackson, 2002 dalam jurnal Wendi Asumri Nasution, 2013 mengungkapkan bahwa kompensasi yang diberikan kepada karyawan terdiri dalam dua bentuk yaitu
 1. Kompensasi yang bersifat *financial*
Bentuk kompensasi ini ada dua macam, yaitu yang pertama, kompensasi langsung yang terdiri dari pembayaran karyawan dalam bentuk upah, gaji, bonus, atau komisi. Yang kedua, kompensasi tidak langsung yang terdiri dari semua pembayaran terdiri dari semua pembayaran yang tidak tercakup dalam kompensasi *financial* langsung yang meliputi liburan, berbagai macam asuransi, jasa seperti perawatan anak atau kepedulian keagamaan, dan sebagainya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Kompensasi yang bersifat *non financial*

Bentuk kompensasi ini seperti pujian, menghargai diri sendiri, promosi jabatan, dan pengakuan yang dapat memengaruhi motivasi kerja karyawan, produktifitas, dan kepuasan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

12. Keadilan Organisasi

Keadilan organisasi (*organizational justice*) adalah sebuah istilah untuk mendefinisikan keadilan di lingkungan tempat bekerja yang berfokus bagaimana para pekerja menyimpulkan apakah mereka diperlakukan secara adil dalam pekerjaannya dan bagaimana kesimpulan tersebut kemudian memengaruhi variabel-variabel lain yang berhubungan dengan pekerjaan. Keadilan dapat dinilai melalui tiga tingkatan kejadian, yaitu hasil atau output yang mereka dapat dari organisasi (keadilan distributif), proses atau kebijakan formal yang dengannya output dialokasikan (keadilan prosedural) dan perlakuan antar perseorangan yang mereka terima dari pembuat keputusan organisasi (keadilan interaksional).

Menurut Toenblom, 1992 dalam skripsi Lisa Amelia, 2013 menyatakan keadilan organisasi dibagi menjadi tiga komponen sebagai berikut:

1) Keadilan distributif

Merupakan persepsi karyawan tentang keadilan pendistribusian sumber daya organisasi dengan memperhatikan beberapa aturan distributif yang merupakan hasil dari keputusan alokasi, misalnya standar gaji. Keadilan distributif dibagi menjadi beberapa tingkatan yaitu sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

1. Keadilan distributif terletak pada nilai

Keadilan hanya berlaku sesuai dengan nilai yang dianut. Prinsip pemetaan dikatakan adil karena nilai tersebut dianut.

2. Keadilan distributif terletak pada perumusan nilai-nilai menjadi peraturan.

3. Keadilan distributif terletak pada implementasi peraturan.

2) Keadilan prosedural

Berkaitan dengan prosedur-prosedur yang digunakan organisasi untuk mendistribusikan hasil dan sumber daya organisasi kepada anggotanya. Aturan pokok keadilan prosedural, yaitu sebagai berikut:

a. Konsistensi

Prosedur yang adil harus konsisten baik dari satu orang kepada orang lain maupun dari waktu ke waktu.

b. Minimalisasi bias

Untuk meminimalisasi bias, maka baik kepentingan individu ataupun pemihakan harus dihindari.

c. Informasi yang akurat dan berdasarkan fakta.

d. Dapat diperbaiki

Prosedur yang adil juga mengandung aturan yang bertujuan memperbaiki kesalahan yang ada ataupun kesalahan yang akan muncul.

e. Representatif

Harus ada penyertaan beberapa pihak sehingga akses untuk melakukan kontrol juga terbuka.

f. Etis

Prosedur yang adil harus berdasarkan pada standar etika dan moral.



3) Keadilan Interaksional

Merupakan perlakuan interaksional yang diambil oleh pembuat keputusan (*decision maker*) antar personal dalam organisasi. Keadilan interaksional diambil dalam tiga aspek yaitu sebagai berikut:

1) Penghargaan

Makin baik kualitas perlakuan terhadap anggotanya maka interaksi dinilai makin adil.

2) Netralitas

Netralitas dapat tercapai bila dasar-dasar dalam pengambilan keputusan, misalnya menggunakan fakta dan bukan opini, yang objektif dan validitasnya tinggi.

3) Kepercayaan

Kepercayaan sebagai suatu pertaruhan terhadap hasil masa depan dengan menyerahkan kepada orang lain.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

13. Ketaatan pada Aturan Akuntansi

Ketaatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata taat yang artinya patuh, tunduk, mematuhi, sedangkan aturan adalah seperangkat hukum, teratur sesuatu yang mengikat. Sedangkan menurut Arens (2011) adalah proses pencatatan, pengklasifikasian kejadian-kejadian ekonomi dengan perlakuan logis yang bertujuan menyediakan informasi keuangan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

Aturan akuntansi dirancang sedemikian rupa sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam standar akuntansi terdapat aturan-aturan



yang harus digunakan dalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan yang berpedoman terhadap aturan-aturan yang dikeluarkan oleh IAI. Informasi yang tersedia dilaporan keuangan sangat dibutuhkan bagi investor dan manajemen sehingga hasil laporan keuangan harus dapat diandalkan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu aturan untuk menjaga keandalan informasi tersebut dan menghindari tindakan yang dapat merugikan perusahaan atau organisasi.

Secara teoritis, ketaatan akuntansi merupakan suatu kewajiban. Sebab, apabila laporan keuangan dibuat tanpa mengikuti aturan akuntansi yang berlaku, keadaan tersebut dinyatakan sebagai suatu bentuk kegagalan dan akan menimbulkan kecenderungan kecurangan atau perilaku tidak etis yang tidak dapat atau sulit ditelusuri auditor. Ketaatan aturan akuntansi dipandang sebagai tingkat kesesuaian prosedur pengelolaan aset organisasi, pelaksanaan prosedur akuntansi, dan penyajian laporan keuangan beserta semua bukti pendukungnya dengan aturan yang telah ditentukan oleh BPK atau SAP (PP RI Nomor 24/2005). Pernyataan ketaatan terhadap aturan akuntansi jika PTN telah menerapkan persyaratan pengungkapan, menyajikan informasi yang bermanfaat bagi kepentingan publik, objektif, memenuhi syarat kehati-hatian dan memenuhi konsep konsistensi penyajian (PSAK No. 1, IAI, 2012).

Terdapat dua pihak yang merupakan pemakai laporan keuangan yaitu pihak intern dan pihak ekstern. Pihak intern merupakan pimpinan selaku pihak pengelola aset dan penyaji laporan keuangan. Sedangkan pihak ekstern merupakan investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok, kreditor, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Mereka memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-beda yang harus dipenuhi. Agar menghasilkan

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



informasi yang berkualitas, maka penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan prosedur dan prinsip serta aturan kerja yang sesuai dengan prinsip akuntansi. Prinsip-prinsip akuntansi merupakan sejumlah aturan yang menjadi pedoman bertindak dalam melaksanakan akuntansi di perusahaan.

Dalam buku *Auditing and Assurance Services An Integrated Approach – An Indonesia Adaptation*, Alvin A. Arens (2011: 71) terdapat beberapa prinsip etika dalam Bagian A kode etik profesional sebagai berikut:

1) Tanggung jawab penerapan

Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peranan tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat, dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi.

2) Integritas

Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (*benchmark*) bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3) Obyektifitas

Obyektifitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektifitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain.

4) Kehati-hatian

Kehati-hatian professional mengharuskan anggota untuk memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan kompetensi dan ketekunan. Hal ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada publik.

5) Kerahasiaan

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh mamakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanap persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya.

6) Konsistensi

Konsistensi merupakan konsep dalam akuntansi yang menuntut diterapkannya standar secara terus menerus, tidak diubah-ubah kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi akan diringkas dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1

Judul	Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Akuntansi: Studi Pada Perusahaan Publik Dan Badan Usaha Milik Negara Di Negara
Tujuan	Menggali persepsi penanggung jawab penyusun laporan keuangan pada perusahaan terbuka dan badan usaha milik negara di Indonesia untuk mengetahui perilaku tidak etis serta kecenderungan kecurangan akuntansi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Peneliti/ Tempat	Wilopo STIE Perbanas, Surabaya
Alat Analisis	<i>Confirmatory Factor Analysis</i> untuk uji validitas dan reliabilitas serta Uji <i>Goodness of Fit</i> dari setiap variabel
Variabel Independen	Keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi, asimetri informasi, dan moralitas manajemen.
Hasil Penelitian	Keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi dan moralitas manajemen berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Asimetri informasi berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

© Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa menandatangani dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sumber	Simposium Nasional Akuntansi IX Padang
--------	--

Tabel 2

Judul	Pengaruh Keadilan Organisasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap kecurangan (Studi Empiris pada Kantor Cabang Utama Bank Pemerintah di Kota Padang)
Tujuan	Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh keadilan organisasi dan sistem pengendalian intern terhadap kecurangan
Peneliti/ Tempat	Lisa Amelia Herman Universitas Negeri Padang
Alat Analisis	Analisis Regresi Berganda
Variabel Independen	Keadlian organisasi dan sistem pengendalian intern
Hasil Penelitian	Keadilan organisasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan.
Sumber	Skripsi – Universitas Negeri Padang

Tabel 3

Judul	Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dengan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel Intervening
Tujuan	Mengetahui perilaku tidak etis serta kecenderungan kecurangan akuntansi serta

1. Ditangr mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengantumkan sumber.
- a. Penguipn hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Penguipn tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Peneliti	Nur Ratri Kusumastuti, Wahyu Meiranto
Tempat	Universitas Diponegoro
Alat Analisis	<i>Structural Equation Model (SEM)</i>
Variabel Independen	Keaktifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi, asimetri informasi, dan moralitas manajemen
Hasil Penelitian	Keaktifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Asimetri informasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Moralitas manajemen berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
Sumber	Diponegoro Journal of Accounting Volume 1, Nomor 1, Tahun 2012

Table 4

Judul	Pengaruh Pengendalian Internal, Ketaatan pada Aturan Akuntansi dan Kecenderungan Kecurangan Terhadap Perilaku Tidak Etis
Tujuan	Menguji pengaruh efektivitas pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, dan perilaku tidak etis terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Kota Padang.

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruhnya atau sebagian karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Peneliti/ Tempat	Vani Adelin, Eka Fauzihardani Universitas Negeri Padang
Alat Analisis	<i>Goodness Fit of Model</i>
Variabel Independen	Efektifitas pengendalian internal, ketaatan pada aturan akuntansi dan perilaku tidak etis
Hasil Penelitian	Efektivitas pengendalian internal dan ketaatan aturan akuntansi berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Perilaku tidak etis berpengaruh signifikan dan positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
Sumber	WRA, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2013

Tabel 5

Judul	Analisis Fraud di Sektor Pemerintahan Kabupaten Kudus
Tujuan	Menggali persepsi para pegawai di instansi pemerintahan mengenai kecenderungan terjadinya <i>fraud</i> di sektor pemerintahan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Peneliti/ Tempat	Muhammad Faisal Universitas Negeri Semarang
Alat Analisis	Analisis SmartPLS 2.0

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Variabel Independen	Sistem pengendalian internal, gaya kepemimpinan, kesesuaian kompensasi, perilaku tidak etis, kultur organisasi, komitmen organisasi, dan penegakan hukum
Hasil Penelitian	Sistem pengendalian internal, gaya kepemimpinan, komitmen organisasi dan penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap kecurangan. Kesesuaian kompensasi dan kultur organisasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan. Perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap kecurangan.
Sumber	Accounting Analysis Journal

Table 6

Judul	Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Perilaku Tidak Etis Staf Akuntansi (Studi Empiris pada SKPD di Kota Padang)
Tujuan	Mengetahui Pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap perilaku tidak etis staf akuntansi pada pemerintah daerah kota Padang, pengaruh kesesuaian kompensasi staf akuntansi terhadap perilaku tidak etis pada pemerintah daerah kota Padang, pengaruh ketaatan pada aturan akuntansi staf akuntansi terhadap perilaku tidak etis pada pemerintah daerah kota Padang, pengaruh asimetri informasi akuntansi staf akuntansi terhadap perilaku tidak etis pada pemerintah daerah kota Padang, dan pengaruh moralitas staf akuntansi terhadap perilaku tidak etis pada pemerintah daerah kota Padang
Peneliti/Tempat	Deri Yuli Universitas Negeri Padang
Alat	<i>Keiser-Meyer-Meansure of sampling Adegeuncy</i> atau KMO-MSA.

1. Dilarang menyalin atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
4. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Analisis	
Variabel Independen	Sistem pengendalian intern pemerintah, kesesuaian kompensasi, ketaatan pada aturan akuntansi, asimetri informasi dan moralitas.
Hasil Penelitian	Sistem pengendalian intern pemerintah, kesesuaian kompensasi, dan ketaatan pada aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap perilaku tidak etis. Asimetri informasi dan moralitas tidak berpengaruh terhadap perilaku tidak etis.
Sumber	Skripsi – Universitas Negeri Padang

Judul	Hubungan Keadilan Organisasi dan Kecurangan Pegawai dengan Moderating Kualitas Pengendalian Internal
Tujuan	Mengukur efek dari hubungan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderating terhadap keadilan organisasi dan kecurangan pegawai
Peneliti/ Tempat	Paramita Puspitadewi, Soni Agus Irwandi STIE Perbanas, Surabaya
Alat Analisis	Analisis Regresi Berganda
Variabel Independen	Persepsi keadilan organisasional, lingkungan etika perusahaan, aktivitas internal audit, pelatihan manajemen resiko, <i>communication and information</i> , dan <i>monitoring</i> .
Hasil Penelitian	Terdapat interaksi antara persepsi keadilan organisasional dan kualitas pengendalian internal terhadap kecurangan pegawai. Tidak ada pengaruh antara lingkungan etika perusahaan dan pelatihan manajemen

Insitut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang menyalin atau seluruh karya tulis ini tanpa menandatangani dan menyertakan sumber.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>resiko dengan kualitas pengendalian internal.</p> <p>Terdapat pengaruh antara aktivitas internal audit dengan kualitas pengendalian internal.</p> <p><i>Communication and information</i> dan <i>monitoring</i> memiliki hubungan yang positif terhadap kualitas pengendalian internal.</p>
<p>Sumber</p>	<p>The Indonesian Accounting Review Volume 2, Nomor 2, Juli 2012</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Kerangka Pemikiran

Pada bagian ini, peneliti akan menjelaskan hubungan antara sistem pengendalian internal, sistem kesesuaian kompensasi, keadilan organisasi, dan ketaatan pada aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi serta melihat adanya konsistensi dari model regresi penelitian terdahulu. Peneliti akan menerapkan hipotesis yang peneliti dapatkan berdasarkan artikel penelitian yang akan diuji. Hipotesis ini sebagai jawaban sementara atau kerangka berpikir dalam penelitian yang akan peneliti lakukan.

1) Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

Kecenderungan kecurangan akuntansi dipengaruhi oleh ada atau tidaknya peluang atau kesempatan. Peluang yang besar membuat kecenderungan kecurangan akuntansi lebih sering terjadi dan sebaliknya. Apabila tidak diimbangi dengan pengendalian internal yang kuat dari dalam perusahaan dapat mengakibatkan kecurangan di dalam pelaporan. Penerapan pengendalian internal yang efektif yang didukung dengan regulasi yang memadai akan



mencegah berbagai bentuk *overstated* dan ketidakwajaran yang merugikan berbagai pihak yang bekepentingan. Menurut Smith *et al.*, (1997), Beasley (1996), Beasley *et al.*, (2000), Reinstein (1998), Matsumura (1992), dan Abbot *et al.*, (2002) dalam Wilopo (2006) menyatakan bahwa pengendalian internal yang efektif mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wilopo dinyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

2) Pengaruh sistem kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

Sistem kesesuaian kompensasi yang tinggi meningkatkan semangat kerja karyawan, sehingga dapat mengurangi kecurangan akuntansi. Tetapi, ada yang mengatakan bahwa kesesuaian kompensasi meningkatkan kecurangan akuntansi dimana karyawan berusaha melakukan kecurangan pelaporan keuangan demi mendapatkan insentif. Menurut Dallas, 2002 dalam Wilopo, 2006, penelitian ini berpendapat bahwa kompensasi yang sesuai akan menurunkan kecenderungan kecurangan akuntansi. Berdasarkan penelitian oleh Nur Ratri Kusumastuti dan Wahyu Meiranto (2012) menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Tetapi, terdapat perbedaan berdasarkan hasil penelitian Wilopo (2006) yang menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3) Pengaruh keadilan organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

Berdasarkan teori Lawler (1971) dalam Suhartini (2005) bahwa ketika seseorang mendapatkan perlakuan yang adil, maka akan menghilangkan rasa kecemburuan antar karyawan serta menghilangkan perasaan bersalah atau tidak puas yang dapat menjauhkan karyawan dalam melakukan suatu tindak kecurangan. Apabila karyawan mendapatkan perlakuan yang tidak adil, dapat menimbulkan kecemburuan sosial sehingga meningkatkan kecurangan akuntansi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Paramita Puspitadewi (2012) menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara keadilan organisasi dan kecurangan pegawai dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel *moderating*. Hasil penelitian ini sama seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Lisa Amelia Herman (2013) yang menyatakan bahwa keadilan organisasi berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

4) Pengaruh ketaatan pada aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

Teori perkembangan moral Kohlberg (1969), moralitas manajemen yang tinggi juga didukung dengan ketaatan aturan yang berlaku. Dalam teori ini, pada tahap konvensional, manajemen berorientasi pada peraturan yang berlaku, sehingga ketaatan aturan akuntansi dapat membentuk moralitas manajemen yang tinggi dan dapat menurunkan kecenderungan kecurangan akuntansi. Teori perkembangan moral dalam tahap konvensional yang terbagi atas tahap ketiga dan keempat dimana kedua tahap tersebut masyarakat mulai menerima adanya perbedaan pendapat dan dapat membedakan mana yang benar dan mana yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

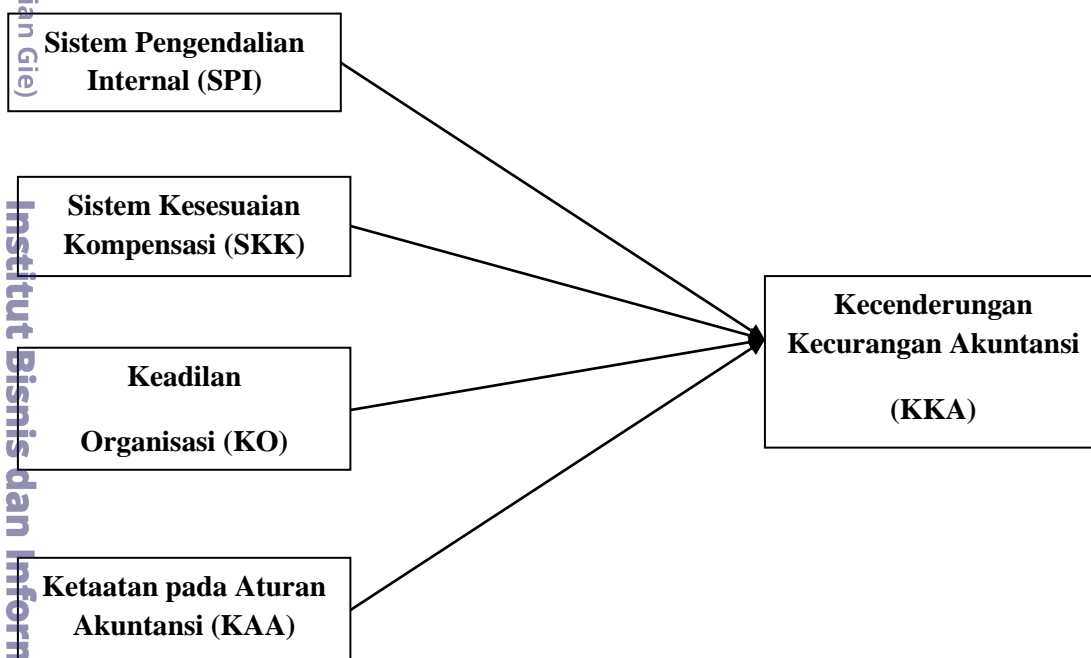
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

salah sehingga masyarakat sudah mulai dipengaruhi oleh aturan, hukum dan sebagainya. Sehingga, kesalahan yang terjadi seperti kegagalan dalam penyusunan laporan keuangan dapat menyebabkan kecurangan perusahaan yang tidak terdeteksi. Teori perkembangan moral menjadi panutan dalam pernyataan kuesioner yang mengacu kepada ketaatan pada aturan akuntansi dimana individu melakukan penyusunan laporan keuangan dan segala hal yang berkaitan dengan aturan akuntansi akan menunjukkan bahwa individu mengutamakan kepentingan pribadi atau kepentingan publik. Berdasarkan penelitian Wilopo (2006) menyatakan bahwa berpengaruh signifikan secara negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Hipotesis

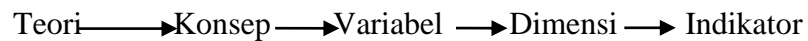
- H1: Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
- H2: Sistem kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
- H3: Keadilan organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
- H4: Ketaatan pada aturan akuntansi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

E. Penguraian Teori Mengarah Kepada Pertanyaan

Menurut Husein Umar (2002: 68) untuk merangkum sekaligus lebih memperjelas suatu teori yang sifatnya kompleks dan komprehensif menjadi bagian-bagian yang lebih detail memerlukan proses penguraian lebih lanjut. Uraian teori menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.2

Penguraian Teori



Berdasarkan indikator-indikator inilah akan dikembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang dimuat dalam kuesioner yang akan disebar oleh penulis kepada responden.

Penerapan penguraian teori tersebut dalam penelitian ini akan diuraikan dengan skema sebagai berikut:

Gambar 2.3

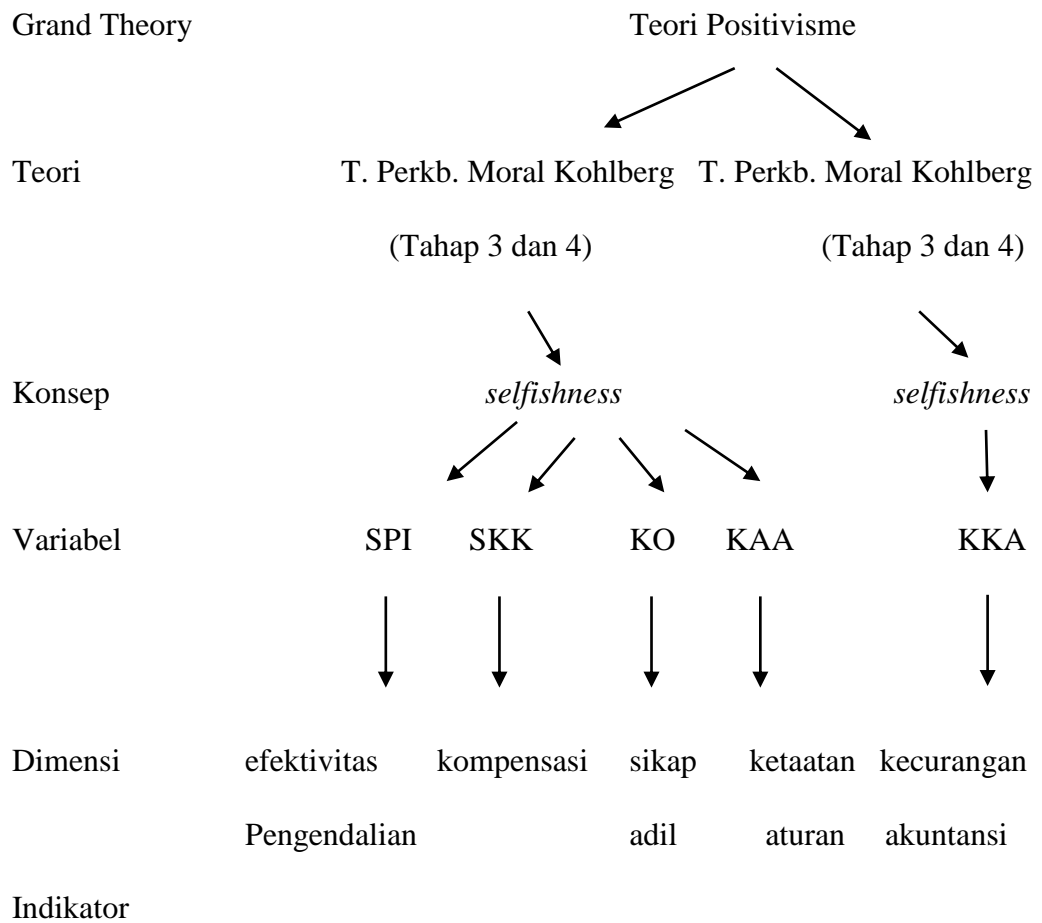
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Penguraian Teori Konsep Variabel Dimensi Indikator dan Pertanyaan



Untuk indikator pada variabel sistem pengendalian internal adalah sebagai berikut:

1. Penerapan wewenang dan tanggung jawab
2. Pencatatan transaksi
3. Pengendalian fisik
4. Sistem akuntansi
5. Pemantauan dan evaluasi

Untuk indikator pada variabel sistem kesesuaian kompensasi adalah sebagai berikut:

1. Kompensasi keuangan
2. Pengakuan perusahaan atas keberhasilan dalam melaksanakan pekerjaan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Promosi
4. Penyelesaian tugas
5. Pencapaian sasaran
6. Pengembangan pribadi

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Untuk indikator pada variabel keadilan organisasi adalah sebagai berikut:

1. Nilai yang dianut
2. Konsistensi
3. Minimalisasi bias
4. Penghargaan

Untuk indikator pada variabel ketaatan pada aturan akuntansi adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab penerapan
2. Kepentingan publik
3. Integritas
4. Obyektivitas
5. Kehati-hatian
6. Kerahasiaan
7. Konsistensi
8. Standar teknis

Untuk indikator pada variabel kecenderungan kecurangan akuntansi adalah sebagai berikut:

1. Kecenderungan untuk melakukan manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Kecenderungan untuk melakukan penyajian yang salah atau penghilangan peristiwa, transaksi, atau informasi yang signifikan dari laporan keuangan,
3. Kecenderungan untuk melakukan salah menerapkan prinsip akuntansi secara sengaja,
4. Kecenderungan untuk melakukan penyajian laporan keuangan yang salah akibat pencurian (penyalahgunaan/penggelapan) terhadap aktiva yang membuat entitas membayar barang/jasa yang tidak diterima.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Berdasarkan penguraian teori yang diarahkan kepada pertanyaan kuesioner yang disusun oleh si peneliti, terdapat perbedaan teori yang digunakan sebagai acuan dasar. Menurut pandangan peneliti, teori yang semula dijadikan acuan pada jurnal yang digunakan oleh peneliti sebelumnya menggunakan teori agency sebagai acuan dasar. Namun, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori perkembangan moral dimana peneliti berpendapat bahwa pertanyaan yang diajukan juga berkaitan dengan sikap moralitas seorang individu. Sehingga, pertanyaan kuesioner bisa digunakan dimana kecurangan akuntansi berkaitan dengan moralitas seorang individu.

Grand theory yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teori positivisme yang diturunkan ke dalam teori perkembangan moral Kohlberg dalam tahap 3 dan tahap 4 dikarenakan populasi yang digunakan merupakan mahasiswa dimana kedua tahapan tersebut menjelaskan posisi mahasiswa berada pada tahapan 3 dan 4 yang menunjukkan seorang individu masih memiliki keegoisan. Dari keegoisan ini memunculkan akibat kecurangan yang diatasi dengan meningkatkan pengendalian internal, kompensasi, keadilan organisasi dan ketaatan pada aturan akuntansi yang dibagi menjadi beberapa indikator seperti yang dijelaskan di atas.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.